



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.877, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2348/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. *International Health Regulations (IHR) 2005*;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu :
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III; dan
 - d. KKP Kelas IV.
- (2) Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Ketentuan setelah Bagian Ketiga ditambahkan satu bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan beberapa pasal baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Pasal 33A

KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33B

Bagan Organisasi KKP Kelas IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Menteri ini.

Pasal 33C

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, informasi, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 33D

Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 33E

Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana,

vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Ketentuan pada Pasal 38 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan para Petugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Para Petugas wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

5. Ketentuan Bab VII Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

LOKASI

Pasal 47

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, 20 (dua puluh) KKP Kelas III, dan 1 (satu) KKP Kelas IV.
 - (2) Daftar KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, KKP Induk, dan Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
6. Ketentuan diantara pasal 50 dan 51 ditambahkan satu pasal baru yaitu pasal 50A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Eselon KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

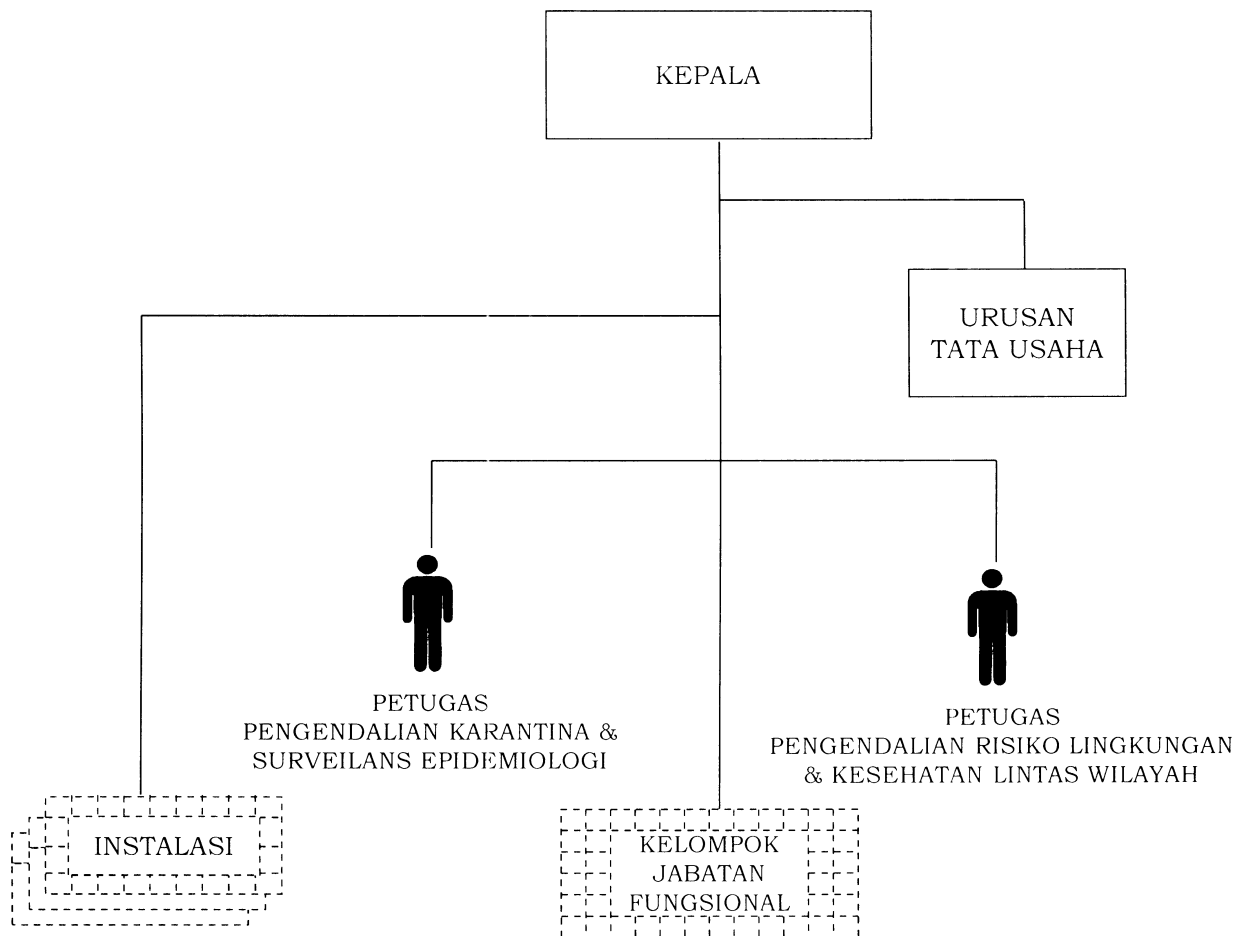
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2348/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN
 PELABUHAN

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
 KELAS IV



MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2348/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN
 PELABUHAN

DAFTAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
1	Tanjung Priok	I	DKI Jakarta	Tanjung Priok (Pelabuhan Laut Tanjung Priok)	1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol 2. Pelabuhan Samudra Muara Baru 3. Pelabuhan Laut Marunda 4. Pelabuhan Laut Kali Baru 5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara
2	Denpasar	I	Bali	Denpasar (Bandara Ngurah Rai)	1. Pelabuhan Laut Celukan Bawang 2. Pelabuhan Laut Padang Bai 3. Pelabuhan Laut Gilimanuk 4. Pelabuhan Laut Benoa
3	Surabaya	I	Jawa Timur	Surabaya (Pelabuhan Laut Tanjung Perak)	1. Bandara Juanda 2. Pelabuhan Laut Gresik 3. Pelabuhan Laut Kalianget 4. Pelabuhan Laut Tuban 5. Pelabuhan Laut Bawean
4	Soekarno Hatta	I	Banten	Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta)	Bandara Halim Perdana Kusuma
5	Medan	I	Sumatera Utara	Medan (Pelabuhan Laut Belawan)	1. Bandara Polonia 2. Pelabuhan Laut Pantai Cermin 3. Pelabuhan Laut Pangkalan Susu 4. Pelabuhan Laut Sibolga 5. Pelabuhan Laut Kuala Tanjung 6. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan 7. Pelabuhan Laut Teluk Nibung 8. Pelabuhan Laut Gunung Sitoli

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
6	Makassar	I	Sulawesi Selatan	Makassar (Pelabuhan Laut Makassar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Hasanudin 2. Pelabuhan Laut Pare-Pare 3. Pelabuhan Laut Malili 4. Pelabuhan Laut Biringkasi 5. Pelabuhan Laut Awerange 6. Pelabuhan Laut Palopo 7. Pelabuhan Laut Belang-Belang Mamuju 8. Pelabuhan Laut Bajoe Bone 9. Bandara Tumpa Padang
7	Batam	I	Kepulauan Riau	Batam (Pelabuhan Laut Batu Ampar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Internasional Hang Nadim 2. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang 3. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang 4. Pelabuhan Laut Pulau Sambu 5. Pelabuhan Laut Nongsa 6. Pelabuhan Laut Kabil 7. Pelabuhan Laut Telaga Punggur 8. Pelabuhan Laut F. Batam Center 9. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung 10. Pelabuhan Laut Teluk Senimba 11. Pelabuhan Laut Semblog 12. Pelabuhan Laut F. Harbour Bay
8	Tanjung Pinang	II	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang (Pelabuhan Laut Tanjung Pinang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Kijang 2. Pelabuhan Laut Tanjung Uban 3. Pelabuhan Laut Samudera Kijang 4. Pelabuhan Laut Tarempa 5. Pelabuhan Laut Lagoi 6. Pelabuhan Laut Lobam 7. Pelabuhan Laut Tambelan 8. Pelabuhan Laut Dabo Singkep 9. Pelabuhan Laut Ranai, Natuna 10. Bandara Matak
9	Banjarmasin	II	Kalimantan Selatan	Banjarmasin (Pelabuhan Laut Banjarmasin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Syamsudin Noor 2. Pelabuhan Laut Kotabaru 3. Pelabuhan Laut Batulicin 4. Pelabuhan Laut Satu 5. Pelabuhan Tanipah

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
10	Kendari	II	Sulawesi Tenggara	Kendari (Pelabuhan Laut Kendari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Wolter Monginsidi 2. Pelabuhan Laut Pomalaa 3. Pelabuhan Laut Bau-Bau 4. Pelabuhan Laut Kolaka 5. Pelabuhan Laut Wanci
11	Tarakan	II	Kalimantan Timur	Tarakan (Pelabuhan Laut Tarakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Tarakan 2. Pelabuhan Laut Bunyu 3. Pelabuhan Laut Sebatik 4. Pelabuhan Laut Nunukan 5. Pelabuhan Laut Berau
12	Mataram	II	Nusa Tenggara Barat	Mataram (Bandara Selaparang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Lembar 2. Pelabuhan Laut Pemenang & Ampenan 3. Pelabuhan Laut Kayangan 4. Pelabuhan Laut Poto Tano 5. Pelabuhan Laut Bima 6. Pelabuhan Laut Sape 7. Pelabuhan Laut Badas 8. Pelabuhan Laut Khusus Benete
13	Padang	II	Sumatera Barat	Padang (Pelabuhan Laut Teluk Bayur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Minangkabau 2. Pelabuhan Laut Muara Padang 3. Pelabuhan Laut Sikakap 4. Pelabuhan Laut Bungus
14	Semarang	II	Jawa Tengah	Semarang (Pelabuhan Laut Tanjung Mas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Achmad Yani 2. Bandara Adi Sumarmo 3. Pelabuhan Laut Pekalongan 4. Pelabuhan Laut Tegal 5. Pelabuhan Laut Jepara 6. Pelabuhan Laut Juwana 7. Pelabuhan Laut Rembang 8. Pelabuhan Laut Batang 9. Pelabuhan Laut Karimunjawa
15	Palembang	II	Sumatera Selatan	Palembang (Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Palembang 2. Pelabuhan Penyeberangan 35 Iilir
16	Probolinggo	II	Jawa Timur	Probolinggo (Pelabuhan Laut Probolinggo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Panarukan 2. Pelabuhan Laut Tanjung Wangi 3. Pelabuhan Laut Pasuruan 4. Pelabuhan Laut Paiton 5. Bandara Abd Rachman Saleh Malang

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
17	Ambon	II	Maluku	Ambon (Pelabuhan Laut Ambon)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Pattimura 2. Pelabuhan Laut Tual 3. Pelabuhan Laut Dobo 4. Pelabuhan Laut Saumlaki 5. Pelabuhan Laut Banda Neira 6. Pelabuhan Laut Namlea 7. Pelabuhan Laut Piru 8. Pelabuhan Laut Tulehu 9. Pelabuhan Laut Wonreli
18	Pekanbaru	II	Riau	Pekanbaru (Bandara Sultan Syarif Kasim II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Pakanbaru 2. Pelabuhan Laut Selat Panjang 3. Pelabuhan Laut Buatan 4. Pelabuhan Laut Siak Sri Indrapura 5. Pelabuhan Laut Tanjung Buton 6. Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru
19	Balikpapan	II	Kalimantan Timur	Balikpapan (Pelabuhan Laut Balikpapan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Sepinggang 2. Pelabuhan Laut Kampung Baru 3. Pelabuhan Khusus Tanah Merah Grogot 4. Pelabuhan Khusus PTP Tanah Merah Grogot 5. Pelabuhan Khusus Senipah 6. Pelabuhan Khusus Handil II 7. Pelabuhan Khusus Long Ikis 8. Pelabuhan Khusus Kuaro 9. Pelabuhan Khusus Sungai Kerang 10. Pelabuhan Laut Semboja
20	Manado	II	Sulawesi Utara	Manado (Bandara Sam Ratulangi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Manado 2. Pelabuhan Laut Tahuma 3. Pelabuhan Marore 4. Pelabuhan Laut Miangas 5. Pelabuhan Laut Siau 6. Pelabuhan Laut Likupang 7. Pelabuhan Laut Lirung 8. Pelabuhan Laut Petta 9. Pelabuhan Laut Melonguane
21	Bandung	II	Jawa Barat	Bandung (Bandara Husein Sastranegara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Cirebon 2. Pelabuhan Laut Balongan 3. Pelabuhan Laut Indramayu 4. Pelabuhan Laut Pamanukan 5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 6. Pelabuhan Ratu Sukabumi 7. Pelabuhan Laut Brebes

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
22	Banten	II	Banten	Cilegon (Pelabuhan Laut Merak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Anyer 2. Pelabuhan Laut Bojonegara 3. Pelabuhan Laut Labuan 4. Pelabuhan Laut Karangantu
23	Pontianak	II	Kalimantan Barat	Pontianak (Pelabuhan Laut Pontianak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Supadio 2. Pelabuhan Laut Sintete 3. Pelabuhan Laut Ketapang 4. Pelabuhan Laut Kandawangan 5. Pos Lintas Batas Entikong 6. Pos Lintas Batas Badau 7. Pos Lintas Batas Jagoi Babang 8. Pos Lintas Batas Aruk 9. Pelabuhan Laut Telok Air
24	Samarinda	II	Kalimantan Timur	Samarinda (Pelabuhan Laut Samarinda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Tanjung Laut 2. Pelabuhan Laut Sangatta 3. Pelabuhan Lhok Tuan 4. Pelabuhan Laut Sangkulirang 5. Bandara Temindung 6. Pelabuhan Laut Tanjung Santan
25	Cilacap	II	Jawa Tengah	Cilacap (Pelabuhan Laut Tanjung Intan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 2. Bandara Tunggul Wulung 3. Pelabuhan Laut Pemalang 4. Pelabuhan Laut Pangandaran
26	Panjang	II	Bandar Lampung	Panjang (Pelabuhan Laut Panjang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Radin Intan II 2. Pelabuhan Laut Bakauheni 3. Pelabuhan Laut Teluk Semangka 4. Pelabuhan Laut Rawajitu
27	Jayapura	II	Papua	Jayapura (Pelabuhan Laut Jayapura)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Sentani 2. Pelabuhan Laut Sarmi 3. Pelabuhan Laut Hamadi 4. Pos Lintas Batas Skouw 5. Bandara Wamena

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
28	Tanjung Balai Karimun	II	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun (Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Pasir Panjang 2. Pelabuhan Laut Tanjung Batu 3. Pelabuhan Laut Moro 4. Pelabuhan Laut Meral
29	Pangkal Pinang	III	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang (Pelabuhan Laut Pangkal Balam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Tanjung Pandan 2. Pelabuhan Laut Manggar 3. Pelabuhan Laut Muntok 4. Pelabuhan Laut Belinyu 5. Bandara Depati Amir 6. Pelabuhan Sungai Selan
30	Bitung	III	Sulawesi Utara	Bitung (Pelabuhan Laut Bitung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Labuan UKI 2. Pelabuhan Amurang 3. Pelabuhan Laut Kotabunan 4. Pelabuhan Kema 5. Pelabuhan Laut Belang 6. Pelabuhan Laut Molibagu 7. Pelabuhan Laut Bintauna
31	Tembilahan	III	Riau	Tembilahan (Pelabuhan Laut Tembilahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Kuala Enok 2. Pelabuhan Laut Pulau Kijang 3. Pelabuhan Laut Rengat 4. Pelabuhan Laut Kuala Gaung 5. Pelabuhan Laut Sungai Guntung
32	Jambi	III	Jambi	Jambi (Bandara Sultan Thaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Jambi 2. Pelabuhan Laut Muara Sabak 3. Pelabuhan Laut Kuala Tungkal 4. Pelabuhan Laut Talang Duku 5. Pelabuhan Laut Nipah Panjang
33	Dumai	III	Riau	Dumai (Pelabuhan Laut Dumai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Bengkalis 2. Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi 3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning 4. Pelabuhan Laut Penipahan 5. Pelabuhan Laut Senebui 6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang 7. Kawasan Industri Pelintang 8. Bandara Pinang Kampai

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
34	Palu	III	Sulawesi Tengah	Palu (Pelabuhan Laut Pantoloan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Mutiara 2. Pelabuhan Laut Donggala 3. Pelabuhan Laut Toli-Toli 4. Pelabuhan Laut Buol 5. Pelabuhan Laut Moutong 6. Pelabuhan Laut Palele 7. Pelabuhan Laut Wani 8. Pelabuhan Laut Luwuk
35	Kupang	III	Nusa Tenggara Timur	Kupang (Bandara El Tari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Tenau 2. Pelabuhan Laut Kalabahi 3. Pelabuhan Laut Atapupu 4. Pelabuhan Laut Labuan Bajo 5. Pelabuhan Laut Maumare 6. Pelabuhan Laut Waingapu 7. Pelabuhan Laut Ende 8. Pelabuhan Laut Reo 9. Pelabuhan Laut Bolok 10. Pos Lintas Batas Motaain 11. Pos Lintas Batas Metamauk 12. Pos Lintas Batas Napan 13. Pelabuhan Laut Lembata 14. Pelabuhan Laut Ba'a 15. Bandara Tambulaka
36	Biak	III	Papua	Biak (Kota Biak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Biak 2. Bandara Frans Kaisepo 3. Bandara Moses Kilangin 4. Pelabuhan Laut Amamapare 5. Pelabuhan Laut Serui 6. Pelabuhan Laut Samabusa 7. Pelabuhan Laut Pomako 8. Pelabuhan Laut Waren
37	Sorong	III	Papua Barat	Sorong (Pelabuhan Laut Sorong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Sorong 2. Pelabuhan Laut Fak-Fak 3. Pelabuhan Laut Kaimana 4. Pelabuhan Laut Khusus Sale 5. Pelabuhan Laut Khusus Arar 6. Pelabuhan Laut Raja Ampat 7. Pelabuhan Laut Teminabuan
38	Manokwari	III	Papua Barat	Manokwari (Pelabuhan Laut Manokwari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Wondama 2. Pelabuhan Laut Bintuni 3. Pelabuhan Laut Babo 4. Bandara Rendani

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
39	Sampit	III	Kalimantan Tengah	Sampit (Pelabuhan Laut Sampit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Kuala Pembuang 2. Pelabuhan Laut Samuda 3. Bandara Pangkalan Bun 4. Pelabuhan Laut Kumai 5. Pelabuhan Laut Sukamara 6. Bandara H. Hasan 7. Pelabuhan Laut Pangkalan Bun
40	Banda Aceh	III	Aceh	Banda Aceh (Kota Banda Aceh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Sultan Iskandar Muda 2. Pelabuhan Laut Malahayati 3. Pelabuhan Laut Ulee Lheu 4. Pelabuhan Lhok Nga 5. Pelabuhan Laut Meulaboh 6. Pelabuhan Laut Singkil 7. Pelabuhan Laut Labuhan Haji 8. Pelabuhan Laut Tapak Tuan 9. Pelabuhan Laut Sinabang
41	Merauke	III	Papua	Merauke (Pelabuhan Laut Merauke)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Agats 2. Pelabuhan Laut Bade 3. Pelabuhan Laut Wanam 4. Pos Lintas Batas Sota 5. Pos Lintas Batas Mindip Tanah
42	Lhokseumawe	III	Aceh	Lhokseumawe (Pelabuhan Laut Lhokseumawe)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Kuala Langsa 2. Pelabuhan Laut Sigli 3. Bandara Rembele 4. Pelabuhan Laut Kuala 5. Bandara Malikussaleh
43	Bengkulu	III	Bengkulu	Bengkulu (Pelabuhan Laut Bai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Fatmawati Soekarno 2. Pelabuhan Laut Muko-Muko 3. Pelabuhan Laut Bintuhan 4. Pelabuhan Laut Malakoni Enggano
44	Poso	III	Sulawesi Tengah	Poso (Pelabuhan Laut Poso)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Ampana 2. Pelabuhan Laut Kolonedale 3. Pelabuhan Laut Banggai Kepulauan 4. Pelabuhan Laut Bungku

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
45	Palangkaraya	III	Kalimantan Tengah	Palangkaraya (Bandara Tjilik Riwut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Pangantan 2. Pelabuhan Laut Sebangau 3. Pelabuhan Laut Kuala Kapuas 4. Pelabuhan Khusus Klanis 5. Pelabuhan Laut Pulang Pisau 6. Pelabuhan Laut Bahawur
46	Gorontalo	III	Gorontalo	Gorontalo (Pelabuhan Laut Gorontalo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Anggrek 2. Pelabuhan Laut Paguat 3. Pelabuhan Laut Kwandang 4. Bandara Djalaluddin 5. Pelabuhan Laut Tilamuta
47	Ternate	III	Maluku Utara	Ternate (Pelabuhan Laut Ternate)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Mangole 2. Pelabuhan Laut Jailolo 3. Pelabuhan Laut Buli 4. Pelabuhan Laut Bacan 5. Pelabuhan Laut Tobelo 6. Bandara Sultan Boabullah 7. Pelabuhan Laut Morotai
48	Sabang	III	Aceh	Sabang (Kota Sabang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Teluk Sabang 2. Bandara Maimun Saleh 3. Pelabuhan Laut Balohan
49	Yogyakarta	IV	DI Yogyakarta	Yogyakarta (Bandara Adi Sutjipto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Baron 2. Pelabuhan Laut Kulonprogo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH